



Media: Seputar Indonesia

Hari: Kamis

Tanggal: 23 Februari 2017

Halaman: 13

Pengemudi Betor Kembali Tuntut Legalitas

YOGYAKARTA - Ratusan pengemudi becak motor (betor) yang tergabung dalam Persatuan Becak Motor Yogyakarta (PBM Y) mendatangi Kompleks Balai Kota Yogyakarta kemarin. Mereka berkumpul memenuhi undangan pemerintah daerah untuk berdialog mencari solusi bagi operasional betor di jalan raya.

"Kami diundang dan dijanjikan akan dibuatkan prototipe betor yang layak jalan," kata Ketua Umum PBM Y Suparmin se usai dialog.

Paguyubannya menyambut positif tawaran tersebut. Namun, Parmin berharap proses pembuatan prototipe melibatkan pengemudi betor. Dia mengklaim telah memiliki desain tersendiri sejak 2008 dan sudah dikomunikasikan langsung dengan Kementerian Perhubungan. Desain tersebut diklaim laik jalan.

"Kami hanya ingin memastikan prototipe nanti nyaman dikendarai teman-teman pengemudi betor. Kabarnya pembuatan prototipe melibatkan tim dari UGM, kami sambutan positif," jelasnya.

Dalam dialog pihaknya meminta agar selama proses pembuatan prototipe, intensitas razia operasional betor dikurangi. Pihaknya juga minta tak dipersulit saat memproses legalitas operasional.

"Kami siap ditata. Kami siap dilegalkan. Tapi, ada kabar akan ada zonasi, betor dilarang mangkal dan melintas Malioboro. Kalau itu, kami dengan tegas menolak," imbuhnya.

Hal serupa disampaikan salah satu pengemudi betor, Suranto.

Kel Hal 14

Pengemudi Betor Kembali Tuntut Legalitas

Dari Hal 13

Dia mengakui pengemudi betor rata-rata berasal dari pengemudi becak kayuh. "Kami minta agar betor bisa memiliki izin jalan. Kami itu sama-sama cari rezeki dengan mengemudikan becak," tandasnya.

Suranto sudah 15 tahun mengemudi becak kayuh. Dua tahun terakhir pria yang mangkal di kawasan Malioboro itu memutuskan beralih mengemudi betor karena faktor usia. Saat ini wisa-tawannya cenderung memilih betor karena lebih cepat waktu tempuh sampai tujuan. "Faktor keamanan saya penuh, ada STNK, spion, rem, tangan, dan kaki, semua lengkap," imbuhnya.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Affrio Sunarno mengatakan, dialog dihadiri pejabat dari Dinas Perhubungan DIY, kepolisian, Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustal) UGM, serta paguyuban betor.

Dia menjelaskan, ujung-pegemudibetor adalah soal legalitas atau hukum. Para pelakubetor butuh fasilitas teknis yuridis agar betor memenuhi syarat sebagai moda transportasi yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di samping konsep desain betor yang layak dan laik jalan.

"Kami ingin mendengar langsung masukan dari pengemudi betor," ujarnya.

Pemkot Yogyakarta siap memberikan fasilitas agar betor menjadi moda transportasi yang layak dan laik. Layak berarti betor pantas dan patut sebagai moda transportasi dan laik artinya betor memenuhi syarat-syarat yuridis formal. "Salah satunya dengan memfasilitasi pembuatan prototipe dan biayanya akan ditanggung pemkot," jelasnya.

Sebelumnya Pemerintah DIY telah mencabut Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 551.2/03/2003 tentang pelanggaran becak motor. Namun, di lapangan kepolisian masih kerap razia karena mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

Berdasarkan data Polda DIY, jumlah betor di DIY mencapai 600 unit, sementara untuk wilayah Kota Yogyakarta jumlah betor mencapai 400 unit dengan wilayah operasi tersebar di tujuh titik yaitu Jalan Mangkubumi, Jalan Malioboro, Jalan Senopati, Jalan Sudirman, Jalan Solo, Jalan Godean, dan Jalan A Yani.

Sementara itu, PBM Y mengklaim jumlah betor di DIY mencapai 1.400 unit dan tersebar di seluruh kabupaten/kota.

ristu hanafi

Instansi	Sifat	Tindak Lanjut
1.	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
2.	☐ Segera	☐ Untuk Diketahui
3.	☐ Biasa	☐ Jumpa Pers
4.		
5.		

-Bappeda ☒ Netral
-Disub ☒ Segera
 ☒ Untuk Diketahui

Yogyakarta,
Ptt. Kepala
Sekretaris
Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005